

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

TAHUN 2024



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPd.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1441

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025.

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Semoga Rencana Kerja 2025 ini dapat dipedomani oleh seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan fungsi pelayanan kepada DPRD Kota Batam guna mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada umumnya dan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Batam pada khususnya.

Batam, Juli 2024

 **SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM**


RIDWAN AFANDI, S.STP., M.Eng
NIP. 19820131 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam.	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam.....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Batam.....	52
3.3 Program dan Kegiatan.	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM	67
BAB V PENUTUP	77
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	77
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.	78
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam.....	23
Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Batam.....	29
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam	35
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam.....	42
Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025	55
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam	60
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana Pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan bidang urusan Pemerintahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja;
- b. Penyusunan rancangan awal Renja;
- c. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir Renja;
- e. Penetapan Renja.



Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja Sekretariat DPRD Kota Batam dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-5 (lima) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Adapaun sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Sekretariat DPRD Kota Batam dalam melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan maksud yaitu:

1. Memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien;
2. Mempermudah pengendalian Kegiatan serta Sub Kegiatan dalam pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait di Lingkup Pemerintah Kota Batam terutama dalam hal monitoring, evaluasi serta hasil pelaporan pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan;
3. Acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam khususnya di Sekretariat DPRD Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) bagi Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
4. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2024 yaitu:

1. Sebagai penjabaran program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran Tahun 2025;
3. Sebagai bahan evaluasi berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Batam
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

BAB IV PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN
LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam

Pada tahun 2023 anggaran yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Batam sebesar **Rp. 144.697.662.086,00,-** (*Seratus empat puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 128.251.916.465,-** (*Seratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus satu puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*) atau sekitar **88.63%** yang tertuang dalam 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam yang mengacu pada sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Awal Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	02				Urusan : Penunjang Urusan Pemerintah								
4	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	93%				92%	92%	99%
4	02	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96%				95%	95%	99%
4	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan			72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	97%
4	02	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen			13 Dokumen	13 Dokumen	93%
4	02	01	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%				94%	94%	99%
4	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket			238 Paket	238 Paket	99%
4	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	134 Orang			132 Orang	132 Orang	99%
4	02	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87%				85%	85%	98%
4	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	100%
4	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			4 Paket	4 Paket	80%
4	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			6 Paket	6 Paket	86%
4	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket			7 Paket	7 Paket	88%
4	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	100%

4	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan					195 Laporan	195 Laporan	99%
4	02	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	85%					84%	84%	99%
4	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit					5 Unit	5 Unit	83%
4	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit					5 Unit	5 Unit	63%
4	02	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%					98%	98%	100%
4	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan					6 Laporan	6 Laporan	86%
4	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	100%
4	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan					13 Laporan	13 Laporan	100%
4	02	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	94%					93%	93%	99%
4	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit					26 Unit	26 Unit	96%
4	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit					51 Unit	51 Unit	98%
4	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit					6 Unit	6 Unit	75%
4	02	01	2	15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	94%					93%	93%	99%
4	02	01	2	15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan					50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	100%
4	02	01	2	15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket					3 Paket	3 Paket	75%
4	02	01	2	15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang					50 Orang	50 Orang	0%

4	02	01	2	16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	84%					83%	83%	99%
4	02	01	2	16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	100%
4	02	01	2	16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan					5 Laporan	5 Laporan	100%
4	02					Urusan Sekretariat DPRD									
4	02	02				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	82%					80%	80%	98%
							2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	82%					80%	80%	98%
4	02	02	2	01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	94%					93%	93%	99%
4	02	02	2	01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dokumen					16 Dokumen	16 Dokumen	94%
4	02	02	2	01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen					14 Dokumen	14 Dokumen	93%
4	02	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	67%
4	02	02	2	01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen					6 Dokumen	6 Dokumen	86%
4	02	02	2	01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	24 Dokumen					22 Dokumen	22 Dokumen	92%
4	02	02	2	02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	87%					86%	86%	99%
4	02	02	2	02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	24 Dokumen					22 Dokumen	22 Dokumen	92%
4	02	02	2	02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24 Dokumen					22 Dokumen	22 Dokumen	92%
4	02	02	2	02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen					26 Dokumen	26 Dokumen	93%
4	02	02	2	02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	28 Dokumen					26 Dokumen	26 Dokumen	93%

4	02	02	2	02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40 Dokumen						38 Dokumen	38 Dokumen	95%
4	02	02	2	02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	26 Dokumen						24 Dokumen	24 Dokumen	92%
4	02	02	2	03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan	92%						92%	92%	100%
4	02	02	2	03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4	02	02	2	03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4	02	02	2	03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4	02	02	2	03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4	02	02	2	03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan						12 Laporan	12 Laporan	100%
4	02	02	2	03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen						3 Dokumen	3 Dokumen	75%
4	02	02	2	03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	14 Dokumen						12 Dokumen	12 Dokumen	86%
4	02	02	2	03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	29 Dokumen						28 Dokumen	28 Dokumen	97%
4	02	02	2	04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	78%						75%	75%	96%
4	02	02	2	04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	50 Dokumen						50 Dokumen	50 Dokumen	100%
4	02	02	2	04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	02	02	2	04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang						25 Orang	25 Orang	93%
4	02	02	2	04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang						9 Orang	9 Orang	100%
4	02	02	2	04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	155 Dokumen						150 Dokumen	150 Dokumen	97%

4	02	02	2	04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	18 Dokumen						16 Dokumen	16 Dokumen	89%
4	02	02	2	04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	93 Dokumen						91 Dokumen	91 Dokumen	98%
4	02	02	2	05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	72%						70%	70%	97%
4	02	02	2	05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan						22 Laporan	22 Laporan	92%
4	02	02	2	05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52 Dokumen						52 Dokumen	52 Dokumen	100%
4	02	02	2	05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen						3 Dokumen	3 Dokumen	100%
4	02	02	2	07		Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	68%						65%	65%	96%
4	02	02	2	07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen						3 Dokumen	3 Dokumen	75%
4	02	02	2	07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen						3 Dokumen	3 Dokumen	75%
4	02	02	2	08		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	89%						87%	87%	98%
4	02	02	2	08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26 Dokumen						25 Dokumen	25 Dokumen	96%
4	02	02	2	08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan						3 Laporan	3 Laporan	100%
4	02	02	2	08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen						12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4	02	02	2	08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	112 Dokumen						110 Dokumen	110 Dokumen	98%

Pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Batam dalam pelaksanaannya terdapat 14 kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan nomenklatur pada tahun 2022 sehingga terdapat perbedaan nama kegiatan dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat perubahan nomenklatur yang tertuang dalam Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-5-1317 Tahun 2023. Terdapat perbedaan nama Program dalam unsur Pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mana perbedaan ini terdapat pada Sistem SIPD sedangkan pada Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota.

Indikator Kinerja Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Batam dengan realisasi ditahun 2021 sebesar 88% sedangkan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89% dengan realisasi 92%. Pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 74% berdasarkan realisasi fisik keuangan per November 2023.

Indikator Kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan realisasi ditahun 2021 sebesar 78% (Persentase peraturan daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu) dan sebesar 91% (Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan) sedangkan target pada tahun 2022 sebesar 76% dengan realisasi sebesar 84% dan 92% untuk Program tersebut. Pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 93% berdasarkan realisasi fisik keuangan per November 2023.

Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Batam dibagi dalam dua program, sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 93% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 86% sedangkan realisasi keuangan 84% dengan 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target dengan realisasi fisik sebesar 84% dan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan realisasi fisik sebesar 88%. Realisasi tidak tercapai dikarenakan masih adanya pembayaran tunjangan kinerja dan tunjangan THR 50% dan honorarium pejabat pengelola keuangan yang belum dibayarkan secara penuh hingga bulan November;
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 93% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 100% sedangkan realiasi keuangan 88%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal dan agenda undangan bimtek. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 84% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 83% sedangkan realisasi keuangan 83%. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa tender, langganan koran yang masih berjalan dan jadwal perjalanan dinas yang disesuaikan. Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 83% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 100% sedangkan realiasi keuangan 92%. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa kontrak dari pengadaan sofa dan kursi kerja. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Pengadaan mebel dan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 98% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 83% sedangkan realiasi keuangan 83%. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran rutin kantor, pengeluaran kebutuhan kantor dan gaji thl. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 92% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 49% sedangkan realiasi keuangan 49%. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian jadwal pembayaran pajak kendaraan, pencairan sesuai proses tahapan termin dan dalam proses lelang pengadaan media center dan atap Gedung kantor. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, Pemeliharaan

peralatan dan mesin lainnya dan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

7. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan target 92% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 83% sedangkan realiasi keuangan 83%. Hal ini disebabkan oleh adanya gaji dan tunjangan Anggota DPRD, penyesuaian agenda dan waktu Anggota DPRD. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD, Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD dan Pelaksanaan medical check up DPRD;
8. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan target 92% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 28% sedangkan realiasi keuangan 28%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian kegiatan dan jadwal fraksi untuk konsumsi. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Fasilitasi fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan target 92% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 69% sedangkan realiasi keuangan 69%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal rapat yang disesuaikan dengan rapat pembahasan yang belum selesai dibahas. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyesuaian dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, Pembahasan rancangan peraturan daerah dan Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik;
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan target 85%

dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 81% sedangkan realisasi keuangan 75%. Hal ini disebabkan oleh adanya konsumsi rapat yang belum dicairkan dan ada yang baru berjalan dibulan September, masih adanya kunjungan kerja yang belum dilaksanakan dan adanya rasionalisasi pagu anggaran. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD perubahan, Pembahasan laporan semester dan Pembahasan pertanggungjawaban APBD;

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 90% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 58% sedangkan realiasi keuangan 58%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal rapat dan agenda rapat dengar pendapat. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan, Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam dan Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target 73% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 83% sedangkan realiasi keuangan 83%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal dan undangan bimbingan teknis dewan, pembayaran tagihan bulanan media online, gaji untuk 39 orang kelompok pakar dan tim ahli, pembayaran gaji untuk 9 orang untuk tenaga ahli fraksi, adanya biaya cetak dan baliho sesuai termin dan

penyesuaian jadwal kunjungan kerja komisi dan badan kehormatan. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu Pendalaman tugas DPRD, Publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan Masyarakat dan penyusunan program kerja DPRD;

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target 68% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 100% sedangkan realiasi keuangan 99%. Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan Pelaksanaan reses;
6. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan target 68% dan realisasi fisik di tahun 2023 sebesar 82% sedangkan realiasi keuangan 82%. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian penugasan Anggota DPRD sesuai jadwal, cetak buku laporan kinerja yang masih dalam proses dan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan konsumsi dalam proses. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, Penyusunan laporan kinerja DPRD, Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah dan Fasilitasi tugas pimpinan DPRD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam

Analisa Kinerja terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam melalui program dan kegiatan yang di anggarkan, antara lain:

1. Masih belum maksimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar Bagian;

2. Masih minimnya jumlah sumber daya aparatur yang terampil, berkualitas dan ahli serta yang memiliki inovasi guna menciptakan terobosan-terobosan;
3. Masih diperlukannya peningkatan partisipasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
4. Masih diperlukannya peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas maka diupayakan agar:

1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tuntutan tantangan dimasa yang akan datang;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur yang terampil sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar tercipta terobosan baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih efektif dengan pola *top down* menjadi *bottom up*;
3. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan;
4. Meningkatkan penyusunan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara cermat dengan pertimbangan adanya kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan pada tahun berjalan serta mengoptimalisasikan pelaksanaan program dan kegiatan melalui mekanisme manajemen Sekretariat DPRD Kota Batam yang pro aktif memonitor dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun pencapaian dan pengukuran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam dapat di lihat dalam tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam

No	Indikator	SPM / SNI	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			86 org/bln	72 org/bln	222 org/bln	76 org/bln	84%	-	222 org/bln	76 org/bln	
2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dok	13 dok	14 dok	15 dok	88%	-	-	15 dok	
3	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			235 paket	238 paket	240 paket	242 paket	-	-	240 paket	242 paket	
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			132 org	132 org	134 org	136 org	88%	-	134 org	136 org	
5	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	77%	-	1 paket	1 paket	
6	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			3 paket	4 paket	5 paket	6 paket	97%	-	5 paket	6 paket	
7	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			5 paket	6 paket	7 paket	8 paket	60%	-	7 paket	8 paket	
8	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			6 paket	7 paket	8 paket	9 paket	77%	-	8 paket	9 paket	

9	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	97%	-	1 paket	1 paket	
10	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	80%	-	2 dok	2 dok	
11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			190 lap	195 lap	196 lap	200 lap	68%	-	196 lap	200 lap	
12	Jumlah Paket Mebel yang disediakan			3 unit	5 unit	6 unit	7 unit	94%	-	6 unit	7 unit	
13	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			4 unit	5 unit	8 unit	9 unit	91%	-	8 unit	9 unit	
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			5 lap	6 lap	7 lap	8 lap	69%	-	7 lap	8 lap	
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	44%	-	12 lap	12 lap	
16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			13 lap	13 lap	-	13 lap	88%	-	13 lap	13 lap	
17	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 unit	26 unit	27 unit	28 unit	68%	-	27 unit	28 unit	
18	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			50 unit	51 unit	52 unit	53 unit	78%	-	52 unit	53 unit	

19	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			5 unit	6 unit	8 unit	10 unit	43%	-	8 unit	10 unit	
20	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			50 org/bln	50 org/bln	50 org/bln	50 org/bln	84%	-	50 org/bln	50 org/bln	
21	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan			2 paket	3 paket	4 paket	5 paket	66%	-	4 paket	5 paket	
22	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			50 org	50 org	50 org	50 org	38%	-	50 org	50 org	
23	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	4%	-	12 lap	12 lap	
24	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			3 lap	5 lap	8 lap	9 lap	31%	-	8 lap	9 lap	
25	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			15 dok	16 dok	17 dok	18 dok	80%	-	17 dok	18 dok	
26	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			12 dok	14 dok	15 dok	16 dok	59%	-	15 dok	16 dok	
27	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			-	2 dok	3 dok	4 dok	-	-	3 dok	4 dok	
28	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi			5 dok	6 dok	7 dok	8 dok	94%	-	7 dok	8 dok	
29	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun			20 dok	22 dok	24 dok	26 dok	0%	-	24 dok	26 dok	

30	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			20 dok	22 dok	24 dok	26 dok	69%	-	24 dok	26 dok	
31	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			20 dok	22 dok	24 dok	26 dok	59%	-	24 dok	26 dok	
32	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			24 dok	26 dok	28 dok	30 dok	85%	-	28 dok	30 dok	
33	Jumlah Dokmen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			24 dok	26 dok	28 dok	30 dok	89%	-	28 dok	30 dok	
34	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			36 dok	38 dok	40 dok	42 dok	71%	-	40 dok	42 dok	
35	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			22 dok	24 dok	26 dok	28 dok	81%	-	26 dok	28 dok	
36	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	55%	-	12 lap	12 lap	
37	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	48%	-	12 lap	12 lap	
38	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	41%	-	12 lap	12 lap	
39	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	55%	-	12 lap	12 lap	

40	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	43%	-	12 lap	12 lap	
41	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			3 dok	4 dok	5 dok	5 dok	-	-	-	5 dok	
42	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			12 lap	14 lap	15 lap	15 lap	-	-	-	15 lap	
43	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			27 dok	28 dok	29 dok	30 dok	70%	-	29 dok	30 dok	
44	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			-	50 dok	50 dok	50 dok	-	-	-	50 dok	
45	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			2 dok	3 dok	3 dok	3 dok	78%	-	3 dok	3 dok	
46	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			23 org	25 org	27 org	28 org	81%	-	27 org	28 org	
47	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			9 org	9 org	9 org	9 org	90%	-	9 org	9 org	
48	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			150 dok	150 dok	155 dok	157 dok	23%	-	155 dok	157 dok	
49	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			15 dok	16 dok	18 dok	20 dok	99%	-	18 dok	20 dok	
50	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			90 dok	91 dok	93 dok	94 dok	60%	-	93 dok	94 dok	

51	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			-	22 lap	24 lap	25 lap	-	-	-	25 lap	
52	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun			52 dok	52 dok	52 dok	52 dok	81%	-	52 dok	52 dok	
53	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	97%	-	3 dok	3 dok	
54	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah			-	3 dok	4 dok	4 dok	-	-	-	4 dok	
55	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun			-	3 dok	4 dok	5 dok	-	-	-	5 dok	
56	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			24 dok	25 dok	26 dok	27 dok	82%	-	26 dok	27 dok	
57	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun			3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	67%	-	3 lap	3 lap	
58	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	83%	-	12 dok	12 dok	
59	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD			109 dok	110 dok	112 dok	114 dok	82%	-	112 dok	114 dok	

Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam

- a. Isu-isu terkait penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pegawai, sarana/prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;
 3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat;
 4. Dibutuhkannya hubungan yang harmonis antar bagian, sub bagian dan aparatur agar terciptanya pelayanan yang prima terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 5. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam;

6. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah;

b. Tingkat Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam

Memperhatikan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Tahun 2023 dapat disimpulkan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam sangat baik. Hal tersebut merupakan hasil dari wujud integritas dalam proses perencanaan strategis dan analisa pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan bersifat penting yakni adanya pemantauan aktivitas dalam proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan.

c. Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni:

- a) Manajemen SDM yang belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kota Batam;
- b) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, seperti struktur organisasi dalam peningkatan kinerja;
- c) Belum optimalnya tingkat pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah SDM terkhusus ASN yang berkualitas baik dari Bidang Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Teknologi;

- d) Kurangnya Pemahaman ASN terhadap Tupoksi, Aturan, Perundang-Undangan dan Kaidah Hukum dan Pemerintahan;
- e) Ketidaksesuaian penempatan ASN yang tidak sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

Selain permasalahan tersebut, terdapat hambatan pada Sekretariat DPRD Kota Batam yaitu:

- a) Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan DPRD sehingga didalam pelaksanaan sangat bergantung pada DPRD. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan terkadang tidak sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah disusun/tetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam.

d. Peluang dan Tantangan

Terdapat peluang yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam, meliputi:

- a) Sumber daya manusia dengan tingkat Pendidikan yang tinggi;
- b) Mengoptimalkan kinerja dalam pelayanan terhadap DPRD;
- c) Melaksanakan pelatihan terkait pelayanan publik secara berkala bagi DPRD;
- d) Adanya kualitas sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- e) Tersedianya ketatalaksanaan untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi;
- f) Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas DPRD.

Selain peluang juga terdapat beberapa tantangan yang ada pada Sekretariat DPRD, tantangan tersebut ialah:

- a) Terbatasnya sarana dan prasarana, baik dari segi *software* maupun *hardware* dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD;
 - b) Keterbatasan jumlah ASN yang memahami Tupoksi yang dapat mengimbangi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada DPRD;
 - c) Kurangnya pelatihan bagi ASN di Sekretariat DPRD Kota Batam.
- e. Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam
- Keterkaitan isu-isu terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam, diuraikan sebagai berikut:
- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pegawai khususnya ASN yang berkompeten dan berkualitas di Bidang Ilmu Pengetahuan, Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD sehingga tidak bisa mengimbangi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD;
 - b. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari Anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat, tepat dan akurat;
 - c. Adanya Lingkaran kerja yang hamonis dan hubungan koordinasi yang bersinergi antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta adanya dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat menumbuhkan semangat kerja dalam melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Batam

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	93%	67.934.367.256	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase terpenuhinya administrasi umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	93%	58.880.814.451	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96%	14.926.839.886	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96%	14.580.974.252	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/bulan	14.828.139.540	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	222 Orang/bulan	14.580.974.252	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	98.700.346	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	751.653.383	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	386.617.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	432.077.691	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	228.480.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	134 Orang	319.575.692	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	134 Orang	158.137.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87%	4.320.118.619	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87%	2.888.898.312	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	433.622.132	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	163.518.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	751.940.211	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	754.940.211	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	205.770.644	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	105.750.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	743.954.274	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	653.337.600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	724.625.629	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	399.636.501	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	577.358.659	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	261.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan	882.847.070	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan	550.116.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	85%	1.148.480.248	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	92%	797.436.119	
	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	99.245.318	Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	125.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	1.049.234.930	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	672.436.119	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98%	2.506.354.732	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	2.830.907.161	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	2.121.054.213	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	1.992.680.400	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	385.300.519	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	434.150.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	404.076.761	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	94%	2.951.414.595	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	94%	2.596.238.900	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	1.230.122.958	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	1.019.932.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	790.149.737	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	645.165.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	931.141.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	931.141.900	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	94%	39.438.917.130	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	90%	33.782.669.707	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Batam	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	38.616.851.855	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Batam	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	32.982.061.932	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	625.607.775	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	625.607.775	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	196.457.500	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	175.000.000	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	84%	1.890.588.663	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Batam	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	84%	1.017.073.000	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	770.799.615	Fasilitasi Fraksi DPRD	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	107.712.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	1.119.789.048	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Batam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Laporan	909.361.000	
	Program Dukungan 2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Batam	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	82%	15.757.588.937	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Batam	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	82%	10.568.431.107	
			2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	82%	57.948.849.523			2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	82%	48.332.157.702	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Batam	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	94%	7.001.489.396	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Batam	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	94%	4.459.008.107	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dokumen	1.910.486.537	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dokumen	1.810.486.537	

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	3.844.927.567	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	1.985.712.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	666.451.698	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	-	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	296.417.722	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	243.152.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	24 Dokumen	283.205.872	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	24 Dokumen	419.657.570	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Batam	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	87%	8.756.099.541	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Batam	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ketentuan	87%	6.109.423.000	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	24 Dokumen	1.277.961.672	Pembahasan KUA dan PPAS	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	24 Dokumen	1.007.000.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24 Dokumen	1.225.268.114	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24 Dokumen	1.009.000.000	
	Pembahasan APBD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen	1.270.773.991	Pembahasan APBD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	28 Dokumen	909.000.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	28 Dokumen	1.352.328.796	Pembahasan APBD Perubahan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	28 Dokumen	907.000.000	
	Pembahasan Laporan Semester	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40 Dokumen	1.964.653.508	Pembahasan Laporan Semester	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	40 Dokumen	1.198.423.000	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	26 Dokumen	1.665.113.460	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	26 Dokumen	1.079.000.000	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Batam	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan	92%	5.132.365.250	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Batam	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan	90%	2.351.569.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	671.598.593	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	352.374.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	565.444.745	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	222.930.000	

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Batam	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	668.685.044	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Batam	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	352.374.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	666.499.882	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	352.374.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	145.344.784	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	134.214.000	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	555.376.415	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	14 Dokumen	721.989.339	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Batam	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	29 Dokumen	1.137.426.448	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Batam	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	29 Dokumen	937.303.000	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Batam	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	78%	26.304.617.533	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Batam	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	90%	16.469.290.890	
	Orientasi DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	50 Dokumen	1.888.279.808	Orientasi DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	-	
	Pendalaman Tugas DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	2.066.856.045	Pendalaman Tugas DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.666.856.045	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Batam	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	5.748.170.683	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Batam	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	1.990.234.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Batam	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	1.823.513.145	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Batam	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	551.021.092	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	155 Dokumen	592.915.417	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	155 Dokumen	618.600.000	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	18 Dokumen	966.092.924	Penyusunan Program Kerja DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	18 Dokumen	6.045.466.000	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	93 Dokumen	13.218.789.511	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	93 Dokumen	5.597.113.753	

	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Batam	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	72%	13.836.723.912	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Batam	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	95%	11.970.035.000	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan	99.677.546	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Batam	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	-	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52 Dokumen	145.097.087	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	52 Dokumen	101.330.000	
	Pelaksanaan Reses	Batam	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	13.591.949.279	Pelaksanaan Reses	Batam	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	11.868.705.000	
	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Batam	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	68%	944.139.905	Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Batam	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	68%	-	
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama	4 Dokumen	388.763.490	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Batam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama	-	-	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen	555.376.415	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	-	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Batam	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	89%	11.731.002.923	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Batam	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	95%	17.541.262.812	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26 Dokumen	9.603.751.658	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26 Dokumen	5.576.423.500	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Batam	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	333.225.849	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Batam	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	294.287.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	999.677.546	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	5.914.316.312	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	112 Dokumen	794.347.870	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	112 Dokumen	5.756.236.000	

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa Pagu Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 60.824.673.225,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sejumlah Rp. 80.816.132.493,-. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Pagu Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 58.880.814.451,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sejumlah Rp. 58.900.588.809,-. Berdasarkan Rancangan Awal Renja terdapat perubahan pada saat penyusunan Rancangan Akhir ini yaitu:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang semula terdapat anggaran berubah menjadi nol;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang semulanya tidak memiliki anggaran kemudian dianggarkan Kembali pada saat Penyusunan Rancangan Akhir Renja dengan jumlah pagu indikatif Rp. 404.076.761,- pada sub kegiatan tersebut.
- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang semula terdapat anggaran kemudian dirubah menjadi nol;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Sub Kegiatan Orientasi DPRD yang semula terdapat anggaran kemudian dirubah menjadi nol;

- ## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam**

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Dalam mendukung tercapainya visi tersebut, juga terdapat 8 Misi yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum

dan aparaturnegara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis;

menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran. Dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan

integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga diberbagai bidang.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok yakni:

- 1) Merosotnya kewibawaan negara;
- 2) Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional;
- 3) Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

- I. Dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
- II. Dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
- III. Dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang menggambarkan cita-cita yang hendak dicapai Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2021-2026. Cita-cita tersebut ditunjukkan melalui visi dan misi dan tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya. Berikut visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini untuk periode 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan
Berbudaya”**

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keuanggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran Masyarakat;
2. Melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa;
4. Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan nasional dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan;
5. Mempercepat konektivitas antar pulau dan Pembangunan infrastruktur Kawasan.

Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2021-2026 telah menetapkan Visi dan Misi. Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026:

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari keempat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi Kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi *"center of excellence"*.
- b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang religius.
- c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
- d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama dan keempat, Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi *"center of excellence"* di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai Kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, mutilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui Kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi Kota yang layak huni.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” dan “Modern”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus

“Bandar Dunia” yang “Modern”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani” yang “modern”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Batam menetapkan tujuan "Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD".

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD.

Tugas utama : Memfasilitasi lembaga DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Tugas Pendukung : Menyediakan sarana dan Prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam menunjang peningkatan kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang terampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Batam

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 37 tahun 2021 dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Batam. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka ditetapkan tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Batam. Tujuan strategis ditetapkan dengan merumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis ini merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai, adapun tujuan strategis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan SDM Sekretariat yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berlandaskan Iman dan Taqwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD;
- b. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam;
- c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam;
- d. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel;
- e. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD;
- f. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya Sekretariat DPRD Kota Batam dapat dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran yang

dituangkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2023, yaitu:

- a. Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam adalah Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam. Tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam berpedoman dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021.
- b. Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam yang berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam serta Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021. Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam adalah Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83
2	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Indeks kepuasan terhadap kinerja Sekretariat DPRD	69
		Presentase capaian kinerja Sekretariat DPRD	83%
3	Optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Batam	Indeks kepuasan DPRD dan Masyarakat terhadap layanan Sekretariat DPRD	72
		Presentase Perda yang disahkan	87%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2025 mengacu pada pencapaian visi dan misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian misi ke 5 (lima) Kota Batam Tahun 2021-2026 yang dipilih Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menjalankan Program dan Kegiatan di tahun 2025. Dalam menjalankan Program dan Kegiatan pada tahun 2025 ada indikator dan target capaian yang tiap tahun harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Batam, yang terdiri dari 2 Program dan 14 Kegiatan di Tahun 2025 dan dapat di lihat dalam tabel 3.2 untuk indikator dan target capaian ditahun 2025 oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Batam:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Penyediaan gaji dan tunjangan; Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
 - b. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya; dan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - c. Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan peralatan rumah tangga;

- Penyediaan bahan logistik kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; dan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- d. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik; Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - e. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; dan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - f. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD; dan Pelaksanaan medical check up DPRD;
 - g. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Fasilitasi fraksi DPRD; dan Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah;

Pembahasan rancangan peraturan daerah; Penyelenggaraan kajian perundang-undangan; Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik; dan Penyusunan tata tertib DPRD;

- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, yang terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu Pembahasan KUA dan PPAS; Pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Pembahasan APBD; Pembahasan APBD perubahan; Pembahasan laporan semester; dan Pembahasan pertanggungjawaban APBD;
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum; Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur; Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat; Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian; Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam; Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan; Pengawasan penggunaan anggaran; dan Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, yang terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu Orientasi DPRD; Pendalaman tugas DPRD; Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli; Penyediaan tenaga ahli fraksi; Penyelenggaraan hubungan Masyarakat; Penyusunan program kerja DPRD; dan Publikasi dan dokumentasi DPRD;
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu Kunjungan kerja dalam

daerah; Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan Pelaksanaan reses;

- f. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah; dan Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
- g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, yang terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD; Penyusunan laporan kinerja DPRD; Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah; dan Fasilitasi tugas pimpinan DPRD;

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi terpenuhinya Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Batam	93%	58.880.814.451	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94%	70.536.253.521
4	02	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	96%	14.580.974.252	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		97%	9.940.202.578
4	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	222 Orang/bulan	14.580.974.252	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		76 Orang/bulan	9.837.722.009
4	02	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Dokumen	102.480.569
4	02	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	95%	386.617.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95%	780.441.708
4	02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Batam	240 Paket	228.480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		242 Paket	448.626.267
4	02	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Batam	134 Orang	158.137.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		136 Orang	331.815.441
4	02	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	87%	2.888.898.312	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90%	4.435.579.161

4	02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Batam	1 Paket	163.518.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	450.229.860
4	02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	5 Paket	754.940.211	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Paket	780.739.520
4	02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Batam	7 Paket	105.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Paket	213.651.659
4	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Batam	8 Paket	653.337.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Paket	722.447.723
4	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Batam	1 Paket	399.636.501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	752.378.790
4	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Batam	2 Dokumen	261.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	599.471.496
4	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	196 Laporan	550.116.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200 Laporan	916.660.113
4	02	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	Batam	85%	797.436.119	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85%	1.192.467.040
4	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Batam	6 Unit	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	103.046.413
4	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Batam	8 Unit	672.436.119	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Unit	1.089.420.627

4	02	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	98%	2.830.907.161	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		98%	8.160.683.395
4	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batam	7 Laporan	1.992.680.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Laporan	2.202.290.589
4	02	01	2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Batam	12 Laporan	434.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	400.057.529
4	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Batam	-	404.076.761	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	5.558.335.277
4	02	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Batam	94%	2.596.238.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95%	3.064.453.774
4	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	27 Unit	1.019.932.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		28 Unit	1.277.236.667
4	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Batam	52 Unit	645.165.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53 Unit	820.412.472
4	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	8 Unit	931.141.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	966.804.635

4	02	01	2	15		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Batam	94%	33.782.669.707	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95%	40.949.427.656
4	02	01	2	15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Batam	50 Orang/Bulan	32.982.061.932	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang/Bulan	40.095.877.281
4	02	01	2	15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Batam	4 Paket	625.607.775	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	649.568.553
4	02	01	2	15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Batam	50 Orang	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Orang	203.981.822
4	02	01	2	16		Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	Batam	84%	1.017.073.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85%	1.962.998.210
4	02	01	2	16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Batam	12 Laporan	107.712.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	800.321.241
4	02	01	2	16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Batam	8 Laporan	909.361.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9 Laporan	1.162.676.969
4	02	02				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana dan tepat waktu	Batam	82%	10.568.431.107	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84%	16.361.104.591
							2. Persentase rekomendasi penyerapan aspirasi yang di laksanakan	Batam	82%	48.332.157.702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84%	67.550.285.774

4	02	02	2	01		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang dibahas sesuai rencana	Batam	94%	4.459.008.107	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95%	7.269.646.437
4	02	02	2	01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Batam	17 Dokumen	1.810.486.537	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Dokumen	1.983.658.170
4	02	02	2	01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Batam	15 Dokumen	1.985.712.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16 Dokumen	3.992.188.293
4	02	02	2	01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	691.976.798
4	02	02	2	01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Batam	7 Dokumen	243.152.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	307.770.520
4	02	02	2	01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Batam	24 Dokumen	419.657.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Dokumen	294.052.656
4	02	02	2	02		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal/ ketentuan	Batam	87%	6.109.423.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		88%	9.091.458.154
4	02	02	2	02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Batam	24 Dokumen	1.007.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Dokumen	1.326.907.605
4	02	02	2	02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Batam	24 Dokumen	1.009.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26 Dokumen	1.272.195.883

4	02	02	2	02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Batam	28 Dokumen	909.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Dokumen	1.319.444.634
4	02	02	2	02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Batam	28 Dokumen	907.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Dokumen	1.404.122.989
4	02	02	2	02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Batam	40 Dokumen	1.198.423.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42 Dokumen	2.039.899.737
4	02	02	2	02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Batam	26 Dokumen	1.079.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 Dokumen	1.728.887.306
4	02	02	2	03		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Hasil/Rekomendasi RDP/RDPU yang dilanjutkan	Batam	92%	2.351.569.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92%	5.328.934.839
4	02	02	2	03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Batam	12 Laporan	352.374.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	697.320.819
4	02	02	2	03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Batam	12 Laporan	222.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	587.101.278
4	02	02	2	03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Batam	12 Laporan	352.374.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	694.295.681
4	02	02	2	03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Batam	12 Laporan	352.374.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	692.026.828

4	02	02	2	03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Batam	12 Laporan	134.214.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	150.911.490
4	02	02	2	03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	576.647.331
4	02	02	2	03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Dokumen	749.641.531
4	02	02	2	03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Batam	29 Dokumen	937.303.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Dokumen	1.180.989.881
4	02	02	2	04		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata tingkat keterlaksanaan program kerja alat kelengkapan DPRD	Batam	78%	16.469.290.890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80%	27.312.084.384
4	02	02	2	04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Dokumen	1.960.600.924
4	02	02	2	04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Batam	3 Dokumen	1.666.856.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	2.146.016.631
4	02	02	2	04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Batam	27 Orang	1.990.234.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	28 Orang	5.968.325.621
4	02	02	2	04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Batam	9 Orang	551.021.092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Orang	1.893.353.699

4	02	02	2	04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Batam	155 Dokumen	618.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		157 Dokumen	615.624.078
4	02	02	2	04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Batam	18 Dokumen	6.045.466.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Dokumen	1.003.094.282
4	02	02	2	04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Batam	93 Dokumen	5.597.113.753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94 Dokumen	13.725.069.149
4	02	02	2	05		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Rekomendasi hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	Batam	72%	11.970.035.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75%	15.301.140.437
4	02	02	2	05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Laporan	1.037.965.196
4	02	02	2	05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Batam	52 Dokumen	101.330.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52 Dokumen	150.654.305
4	02	02	2	05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Batam	3 Dokumen	11.868.705.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	14.112.520.936
4	02	02	2	07		Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang ditindak lanjuti	Batam	68%	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70%	980.300.463

4	02	02	2	07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	403.653.132
4	02	02	2	07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Batam	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	576.647.331
4	02	02	2	08		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang terpenuhi	Batam	89%	17.541.262.812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	18.627.825.649
4	02	02	2	08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Batam	26 Dokumen	5.576.423.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27 Dokumen	9.971.575.346
4	02	02	2	08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Batam	3 Laporan	294.287.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	345.988.399
4	02	02	2	08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Batam	12 Dokumen	5.914.316.312	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	1.037.965.196
4	02	02	2	08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Batam	112 Dokumen	5.756.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114 Dokumen	7.272.296.708

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Rencana Kerja Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan kegiatan dan sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Program dan Rencana Kerja operasional Sekretariat DPRD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan program tersebut, Sekretariat DPRD Kota Batam pada tahun 2025 menetapkan rencana kerja dengan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan													
					SEKRETARIAT DPRD									117.781.403.260,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									117.781.403.260,00	
4	02				SEKRETARIAT DPRD									117.781.403.260,00	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									58.880.814.451,00	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									14.580.974.252,00	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	222 Orang/bulan	-	14.580.974.252,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										
						-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									386.617.000,00	
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
						-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Batam, Batam Kota, Teluk Tering	-	240 Paket	-	228.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
						-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	134 Orang	-	158.137.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									2.888.898.312,00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	163.518.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Paket	-	754.940.211,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Paket	-	105.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Paket	-	653.337.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	399.636.501,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	261.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	196 Laporan	-	550.116.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								797.436.119,00	
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Unit	-	672.436.119,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.830.907.161,00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Laporan	-	1.992.680.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							58.900.588.809,00			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							4.459.008.107,00			
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Dokumen	-	1.810.486.537,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	15 Dokumen	-	1.985.712.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan										
						-	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	243.152.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD										
						-	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Dokumen	-	419.657.570,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							6.109.423.000,00			
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Dokumen	-	1.007.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	24 Dokumen	-	1.009.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	28 Dokumen	-	909.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	28 Dokumen	-	907.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 Dokumen	-	1.198.423.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	26 Dokumen	-	1.079.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								2.351.569.000,00		
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	352.374.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	222.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	352.374.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	352.374.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	134.214.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	29 Dokumen	-	937.303.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								16.469.290.890,00		
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	1.666.856.045,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	27 Orang	-	1.990.234.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	9 Orang	-	551.021.092,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	155 Dokumen	-	618.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	18 Dokumen	-	6.045.466.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	93 Dokumen	-	5.597.113.753,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								11.970.035.000,00		
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Laporan	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD										
						-	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	52 Dokumen	-	101.330.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	11.868.705.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								0,00		
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah										
						-	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi										
						-	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	0 Dokumen	-	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								17.541.262.812,00		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	26 Dokumen	-	5.576.423.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD										
						-	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	294.287.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	5.914.316.312,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	110 Dokumen	-	5.756.236.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
TOTAL													117.781.403.260,00		

Dalam mengintensifikan penyelenggaraan kesekretariatan yang professional untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD merupakan prioritas utama Sekretariat DPRD Kota Batam. Melalui peningkatan kinerja pelayanan SDM Sekretariat yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta berlandaskan Iman dan Taqwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan guna meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja DPRD, diantaranya;

- a. Meningkatkan pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD Kota Batam;
- b. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan DPRD Kota Batam;
- c. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang baik, bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan Akuntabel;
- d. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan fungsi DPRD;
- e. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 dan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2021-2026 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 terdiri dari 2 Program, 14 Kegiatan dan 59 sub kegiatan. Dokumen renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran Pembangunan daerah, prioritas Pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana dasar perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2025.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan Pembangunan yang berkualitas. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan Pembangunan tahun 2025 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan /mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJDP Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam);
2. Renja Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan Upaya melalui Pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur nbaik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam, maka seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Batam secara berjenjang, bertanggungjawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI